

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis pangan telah benar-benar terjadi diberbagai belahan dunia. Hal ini ditandai dengan melonjaknya harga-harga pangan dunia seperti makanan pokok berupa gandum, kedelai, beras, dan jagung. Penurunan pasokan berdampak pada harga pangan di pasar dunia semakin melambung, sehingga mengakibatkan masyarakat miskin harus membayar lebih mahal dibandingkan orang kaya di negara maju.

Departemen Pertanian (1999) telah menetapkan isu ketahanan pangan sebagai salah satu fokus utama kebijaksanaan operasional pembangunan pertanian dalam Kabinet Gotong Royong (1999-2004), dan komitmen ini dilanjutkan dalam Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009). Memantapkan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi sumberdaya manusia suatu bangsa.

Sejarah membuktikan bahwa ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional (Ritonga, 2008; Irianto, 2008). Selain itu, ketahanan pangan dalam arti keterjangkauan pangan juga berkaitan erat dengan upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia. Tanpa dukungan pangan yang cukup dan bermutu, tidak mungkin dihasilkan sumberdaya manusia yang bermutu, oleh karena itu membangun sistem ketahanan pangan yang kokoh merupakan syarat mutlak bagi pembangunan nasional.

Kejadian rawan pangan dan gizi buruk mempunyai makna politis yang negatif bagi penguasa. Bahkan di beberapa negara berkembang, krisis pangan dapat menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa (Ariani et al., 2006). Kejadian rawan pangan di tingkat rumah tangga dengan proporsi cukup besar masih ditemukan di daerah-daerah dengan ketahanan pangan tingkat regional (provinsi) maupun tingkat nasional terjamin (Saliem et al., 2001). Oleh karena itu pencapaian tingkat ketahanan pangan yang mantap di tingkat nasional maupun regional saja tidak cukup. Mantapnya ketahanan pangan tingkat desa dan tingkat rumah tangga serta individu merupakan sasaran pembangunan ketahanan pangan suatu Negara.

Pemerintah telah mengeluarkan PP No 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Intinya ketahanan pangan sangat penting untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Berbekal PP tersebut semestinya, ketahanan pangan menjadi agenda penting bagi pemerintah bersama masyarakat untuk dilaksanakan. Apalagi banyak komoditi penting yang sampai saat ini masih harus impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Oleh karena itu, membangun kewaspadaan dan atau ketahanan pangan dari strata pemerintahan yang paling rendah yaitu desa (kelurahan) secara bertahap dan konsisten menjadi suatu keniscayaan untuk menjamin tegaknya kedaulatan pangan di tingkat desa dan atau rumah tangga.

1.2. Perumusan Masalah

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu sensitif bagi keamanan suatu bangsa. Secara umum, ketahanan pangan yang rapuh akan memicu terjadinya konflik. Jacques Diouf (2008) selaku Direktur Jenderal Badan Pangan Dunia (FAO), mengatakan bahwa kelangkaan pangan yang disusul melambungnya harga telah memicu kerusuhan, antara lain di Mesir, Kamerun, Haiti dan Burkina Faso.

Ketersediaan pangan yang cukup secara nasional ternyata tidak menjamin adanya ketahanan pangan tingkat wilayah (regional), pedesaan, serta rumah tangga individu. Hal ini ditunjukkan antara lain dari studi yang dilakukan oleh Saliem et al. (2004). Terkait dengan fakta tersebut maka masalah bagaimana mengelola ketersediaan pangan yang cukup tersebut agar dapat diakses oleh rumah tangga individu di masing-masing wilayah desa merupakan isu menarik untuk ditelaah. Pengelolaan pangan terkait dengan masalah bagaimana mengelola cadangan pangan, dalam hal ini manajemen cadangan pangan merupakan salah satu aspek yang belum banyak dikaji secara baik.

Ketahanan pangan juga merupakan isu sentral yang menjadi domain utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, meskipun sudah diketahui publik bahwa Sukoharjo merupakan salah satu lumbung beras nasional atau berhasil sebagai daerah swasembada beras. Hal ini dibuktikan dengan jumlah produksi beras Sukoharjo yang cukup signifikan, yaitu pada posisi April 2006 mencapai 29.352 ton GKG dengan luas lahan panen 4.651 ha. (Pemda Sukoharjo, 2010). Namun bukan berarti Kabupaten Sukoharjo telah terbebas dari persoalan rawan pangan dan atau ketahanan pangan. Persoalan ketahanan pangan bagi pemerintah daerah

tentunya bukan sekedar terpenuhinya aspek ketersediaan pangan bagi masyarakat (rumah tangga) artinya pemerintah telah mampu menyediakan pangan bagi seluruh anggota masyarakatnya (Nainggolan, 2006), tetapi juga yang jauh lebih penting adalah aspek aksesibilitas (keterjangkauan) masyarakat (rumah tangga) terhadap bahan pangan. Daya beli rumah tangga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keterjangkauan pangan. Sementara, daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan harga komoditas pangan.

Pertanyaan krusial-nya adalah seberapa besar keterjangkauan rumah tangga-rumah tangga (masyarakat) terhadap bahan pangan, khususnya beras di Kabupaten Sukoharjo? Total penduduk Sukoharjo pada tahun 2005 sebesar 817.108 jiwa atau 202.930 KK (PNPM, 2008), yang tersebar pada 12 kecamatan, 152 Desa dan 17 Kelurahan (Pemkab Sukoharjo, 2008). Dari 202.930 KK tersebut terdapat 90.701 KK yang termasuk dalam kategori KK Miskin dengan rincian per-kecamatan yaitu: 10.089 KK di Kecamatan Weru; 11.002 KK di Kecamatan Polokarto; 6.616 KK di Kecamatan Gatak; 7.567 KK di Kecamatan; 9.425 KK di Kecamatan Tawangasari; 9.574 KK di Kecamatan Sukoharjo; 5.841 KK di Kecamatan Nguter; 7.796 KK di Kecamatan Bendosari; 8.307 KK di Kecamatan Mojolaban; 5.502 di Kecamatan Baki; 3.671 KK di Kecamatan Grogol dan 5.311 KK di Kecamatan Kartasura.

Sementara itu, dari 152 Desa di Kabupaten Sukoharjo terdapat 26 Desa tertinggal yang tersebar di 6 Kecamatan yaitu: 5 desa di Kecamatan Weru; 3 Desa di Kecamatan Bulu; 2 Desa di Kecamatan Tawangasari; 5 Desa di Kecamatan

Nguter; 6 Desa di Kecamatan Bendosari dan 5 Desa di Kecamatan Polokarto (PNPM, 2008).

Data-data tersebut menunjukkan adanya paradoks bahwa predikat yang disandang Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional dan merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang berhasil swasembada beras, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa aksesibilitas (keterjangkauan) pangan dan atau ketahanan pangan rumah tangga di pedesaan masih sangat rendah. Sehingga dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan model peran pemerintah desa melalui lumbung pangan desa dalam pengelolaan stok (cadangan) pangan di daerah penelitian; dan
2. Bagaimana rumusan model revitalisasi fungsi dan peran lumbung pangan desa sehingga dapat menjamin tegaknya kedaulatan pangan (produksi, ketersediaan dan akses pangan) tingkat desa di daerah penelitian.